

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

LUMPUR LAPINDO

Ketua DPR Prihatin

SIDOARJO (Suara Karya): Ketua DPR Agung Laksono mengaku prihatin atas upaya penanganan luapan lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jatim, yang sampai kini belum berhasil. Agung mengharapkan masyarakat bersabar menantikan upaya penutupan sumber luapan itu.

"Saya melihat sudah ada kerja keras antara Timnas Penanggulangan Lumpur, unsur pemerintah, dan Lapindo. Namun kita lihat upaya keras itu belum berhasil walaupun telah dilakukan dengan berbagai cara dan alternatif," kata Agung saat meninjau lokasi luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jumat.

Menurut Agung, pemerintah dan Lapindo perlu diberi waktu untuk bisa menyelesaikan penghentian semburan dan banjir lumpur ini. Tapi dia juga mengingatkan pemerintah dan pihak terkait agar berusaha keras mengantisipasi datangnya musim hujan yang niscaya menimbulkan persoalan baru.

Pemerintah dan Lapindo, kata Agung, harus menyadari bahwa mereka dikejar waktu dalam upaya menutup sumber luapan lumpur. "Usaha pemerintah dan Lapindo tidak boleh berhenti pada upaya pembuangan lumpur ke laut, tapi juga harus menutup sumber luapan. Kita berharap upaya-upaya ini bisa ditemukan dan semburan lumpur bisa segera diatasi," ujarnya. Dia menambahkan, segala upaya itu tetap memerlukan dukungan kepercayaan masyarakat.

Agung mengingatkan, untuk mencegah korban lebih banyak, maka relokasi warga Porong menjadi alternatif terbaik.

Terlebih jika mengingat musim hujan, ada kemungkinan bencana lumpur ini akan menelan korban. "Karena itu, upaya pembuangan lumpur ke laut tidak boleh terhambat. Memang harus dilakukan upaya pencairan (lumpur) dulu. Tapi jangan sampai menunggu musim hujan tiba, karena risikonya tinggi terhadap daya tahan tanggul (penahan lumpur)," ujar Agung.



Agung Laksono

Sebelum musim hujan, pemerintah dan Lapindo harus bisa menyelesaikan relokasi warga Porong ke tempat yang lebih aman. Caranya, warga diberi tunjangan untuk perumahan dan modal usaha.

Sementara itu, mengenai tanggung

jawab keuangan untuk mengatasi masalah lumpur, Agung menyatakan bahwa itu ditanggung Lapindo. "Tidak ada alokasi dari APBN," katanya.

Sementara itu, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan, Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo harus bekerja ekstra jika tidak mau kemampuan mereka diragukan publik. "Timnas belum mampu menemukan format penyelesaian yang tepat dalam penanganan lumpur Lapindo," kata Akbar.

Menurut Akbar, penanganan Timnas belum menampakkan tanda-tanda ada langkah yang ditempuh sudah tepat atau optimal. Dia mencontohkan, masalah pembuangan lumpur tidak bisa dialirkan secara efektif karena alat yang menyedot lumpur tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan lumpur tidak bisa dialirkan.

Akbar mengusulkan agar disediakan suatu tempat, yang dikhususkan untuk menampung pembuangan lumpur, sehingga tidak mempengaruhi dampak lingkungan yang ada.

Di lain pihak, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Wahyudin Munawir, mengatakan, Timnas perlu bekerja lebih keras lagi karena gejala alam yang terjadi sangat dahsyat.

Dikatakan Wahyudin, semburan lumpur PT Lapindo Brantas Inc volumenya tidak stabil dan akan terus bertambah. Itu memperlihatkan bahwa tekanan dari dalam bumi sangat tinggi, dari lapisan Kujung dan Kalibeng, yang terkait dengan struktur geologi.

Penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo memang perlu lebih serius, bukan saja dari Timnas, tapi juga seluruh pihak yang terkait. "Kita khawatir, bila ini terus berlangsung, maka usaha yang telah kita lakukan akan percuma saja. Saya mendapat informasi volume semburan lumpur terus bertambah. Ini menggambarkan bahwa memang aktivitas yang ada di dalam bumi terus memunculkan semburan ke permukaan," ujar Wahyudin.

Untuk itu, Wahyudin meminta pemerintah tidak perlu lagi ragu untuk meminta bantuan dari negara lain. "Mayday-lah kepada dunia internasional untuk selesaikan," kata Wahyudin.

Dia mendesak agar Timnas untuk meminta bantuan dari ahli-ahli perminyakan dari negara-negara lain. "Pakar-pakar

ternasional, salah satunya dari Houston," kata Wahyudin.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Energi Syaifurrahman Alhanjary mengatakan, Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo harus terbuka dalam upaya penghentian lumpur panas Sidoarjo sudah buntu. "Memang, Ketua Timnas sudah mengumumkan bahwa daerah Porong dan sekitarnya yang terkena lumpur panas, menjadi daerah rawan bencana. Tetapi ada solusinya? Sementara mengangkut lumpur panas lewat Sungai Porong juga terancam gagal," kata Syaifurrahman.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa sedih karena hingga saat ini semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo belum juga bisa dihentikan meskipun sudah berbagai cara telah dilakukan.

"Kita memang sedih sekali, ternyata belum berhasil menghentikan semburan," kata Wa-

pres M Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Wapres menjelaskan bahwa selama ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan semburan lumpur panas tersebut, baik dengan teknik pengeboran untuk mengalirkan lumpur ke laut, maupun dengan upaya lainnya, namun semuanya dari semua usaha tersebut belum juga membuahkan hasil.

Sementara itu, kolam-kolam penampungan yang disediakan ternyata tidak mampu menampung semburan lumpur panas tersebut karena volume semburannya yang selalu meningkat.

Pada awalnya semburan lumpur panas hanya mencapai sekitar 30 ribu meter kubik per hari, namun selanjutnya justru meningkat menjadi 50 ribu meter kubik per hari dan sekarang justru menjadi 100 ribu meter kubik per hari.

"Karena itu, memang tidak ada cara lain agar masyarakat aman dan tak terjadi bencana, (lumpur panas tersebut) dibuang ke laut melalui Sungai Porong," kata Wapres.

Mengenai beberapa kali gagalnya upaya pembuangan lumpur panas tersebut ke laut, menurut Wapres, itu hanya masalah teknis saja.

Di lain pihak, PT Kereta Api (PTKA) mendesak Lapindo Brantas agar segera membayarkan kerugian yang mereka tanggung akibat luapan lumpur di Porong, Sidoarjo. Meskipun tidak banyak, toh Lapindo belum membayar kerugian itu.

"Kerugian kami hanya sekitar Rp 430 juta. Sampai sekarang itu belum juga dibayar Lapindo. Kami mendesak Lapindo segera membayar kerugian kami karena trek kami di sana (Porong) sudah mulai *ambles*," ujar Dirut PTKA Ronny Wahyudi kepada wartawan di sela peninjauan kesiapan angkutan Lebaran di Stasiun Kereta Api Balapan Solo, Jumat.

Sementara itu, untuk kereta yang melewati kawasan Porong,

untuk bisa dilewati, sebab tanggul yang jebol tidak berada di pinggir jalur trek kereta api. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan membuat saluran di pinggir trek sehingga air bisa langsung ke sungai dan bisa mengamankan trek kereta api.

"Meskipun tanggul yang jebol tidak berada di pinggir trek kereta, akibat rembesan air dari jalan tol, rel kemarin sempat molet, itu yang menjadi kerugian kita," katanya lagi.

Jika alternatif pembuatan saluran tersebut ternyata tidak mampu menahan, terutama pada saat musim penghujan nanti, maka alternatif lain yang harus dilakukan adalah memutar jalur kereta api. Yaitu dengan melalui jalur memutar, Malang-Mojokerto-Kediri. "Jika harus memutar maka akan memakan waktu lebih lama sekitar 5 jam, seperti angkutan untuk BBM," ujarnya.

Wardani/Wahidhanna/Ams/Endang K

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 1		TAHUN 2006

AMUK MASSA

Pencairan Dana BLT di Mulia Rusuh

TIMIKA, KOMPAS — Pencairan dana bantuan langsung tunai di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (13/10), berakhir rusuh. Sekitar 300 orang yang marah karena tidak mendapat dana bantuan langsung tunai atau BLT membakar Gedung DPRD Kabupaten Puncak Jaya, merusak kantor pos, Kantor Distrik Mulia, Kantor Bupati Mulia, dan sejumlah rumah warga.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Kartono Wangsadisastro mengatakan, dalam kerusuhan itu satu orang tewas dan dua orang terluka akibat terkena pantulan proyektil peluru.

Menurut Kartono, Jumat malam, polisi sudah berhasil mengendalikan situasi, tetapi suasana Mulia masih tetap mencekam.

Dana BLT itu disalurkan oleh Kantor Pos Mulia yang terletak di kawasan Kota Lama. Kawasan Kota Lama ini berjarak sekitar 4 kilometer di barat Kota Baru, kawasan perkantoran Pemerin-



pati Kabupaten Puncak Jaya. "Pembagian kartu BLT sudah dilaksanakan hari Kamis. Karena tidak mendapat dana BLT, sejumlah orang marah. Sekitar 300 orang yang tidak mendapat dana BLT akhirnya merusak Kantor Pos di Mulia," kata Kartono. Mereka merusak Kantor Distrik Mulia yang letaknya bersebelahan dengan kantor pos. Sejumlah rumah di sekitar kantor distrik juga dilempari batu sehingga pecahan kaca berhamburan di mana-mana.

Massa mendekati Kantor Bu-

pati Puncak Jaya, tetapi berhasil dihalau polisi. Meskipun demikian, batu-batu yang dilemparkan massa sempat mengenai kaca kantor tersebut.

Sejumlah orang berhasil menyusup ke Gedung DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Sesaat kemudian api berkobar hebat dan gedung itu ludes dilalap api sekitar pukul 12.50 WIT.

Kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah ini luasnya 14.532 km dengan penduduk sekitar 107.000 jiwa. Mulia bisa dicapai dalam waktu 25 menit penerbangan dari Wamena.

Menurut keterangan yang diperoleh Kompas, dalam peristiwa itu satu orang tewas dan empat orang luka. Korban tewas bernama Leri Tabuni, sedangkan yang terluka adalah Tarina Telenggeng, Monbin Tabuni, Ulele Telenggeng, dan Yamesi Kogoya.

"Orang yang meninggal itu terinjak-injak massa. Diduga lelaki itu mabuk dan terjatuh," ujar Kartono. Namun, ia belum bisa memberi keterangan mengenai identitas para korban. (ROW/SF)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2006

LUMPUR PANAS Jangan Mengalihkan Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS — Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Semburan Sidoarjo diharapkan tidak mengalihkan tanggung jawab dari Lapindo Brantas Inc kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah diminta tegas agar bencana serupa tidak terulang.

Demikian salah satu pokok bahasan yang muncul dalam dialog terbuka yang diselenggarakan Greenpeace Asia Tenggara dan Yayasan Pitaloka, Jumat (13/10). Tampil membuka dialog pengamat ekonomi Faisal Basri, pengamat politik Sukardi Rinakit, tokoh perempuan Musdah Mulia, rohaniwan Romo Benny Susetyo Pr, wakil Kementerian Negara Lingkungan Hidup Agus Purnomo, artis Rieke Dyah Pitaloka, dan moderator Effendi Gazali.

Acara dibuka dengan pembacaan gugatan terhadap Lapindo Brantas. Lima butir tuntutan, masing-masing kompensasi adil,

akses publik terhadap informasi, perangkat penanggulangan yang berfungsi baik, dana rehabilitasi, dan tuntutan tanggung gugat dan tanggung jawab hukum Lapindo dan Aburizal Bakrie.

"Kalau memang tak mampu, tawarkan proyek penutupan semburan lumpur kepada dunia internasional untuk cari yang mampu dan tagihkan biaya kepada Lapindo. Jangan satu sen pun keluar dari negara," kata Faisal Basri. Kasus ini membutuhkan ketegasan presiden demi keselamatan masyarakat dari bahaya yang lebih dahsyat.

Sedangkan Greenpeace menyatakan korporasi telah diberi kenyamanan dan fasilitas untuk mengeruk keuntungan. Namun, pada saat timbul masalah, mereka cenderung lari dari tanggung jawab. Bencana Lapindo merupakan contoh klasik kecenderungan itu.

Sukardi Rinakit menilai, keputusan sidang kabinet yang mengizinkan pembuangan lumpur ke Sungai Porong tanpa pengolahan, sementara pihak Kementerian Negara LH tak merekomendasikannya, menunjukkan arogansi pemerintah dan pemerintah yang tak peduli terhadap rakyatnya. Romo Benny Susetyo menyatakan, pemerintah dan Lapindo harus mendengarkan keinginan masyarakat korban. (GSA)

49

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2006

KASUS FREEPORT

Antonius Wamang Dituntut 20 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS — Terdakwa pembunuh warga Amerika Serikat di Papua, Antonius Wamang, dituntut selama 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Selain Wamang, jaksa juga menuntut Agustinus Anggaibak dan Julianus Deikme 15 tahun penjara, dan menuntut empat terdakwa lainnya, yaitu Ishak Onawame, Esau Onawame, Hardi Tsugumol, dan Yairus Kiwak alias Kibak, masing-masing 8 tahun penjara.

Pembacaan tuntutan ini diba-

cakan oleh tim jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/10). Namun, dalam sidang yang dipimpin Andriani Nurdin itu, para terdakwa meninggalkan ruang persidangan.

Jaksa Anita Asterida menyatakan, Antonius Wamang terbukti bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama dengan para terdakwa lainnya. Akibat tindakan terdakwa, tiga orang meninggal, yaitu Ricky Lynn Spier, warga negara Ame-

rika Serikat; Edwin Leon Burgon, dan FX Bambang Riwanto.

Antonius Wamang dan rekan-rekannya menolak mengikuti sidang itu. Mereka menolak karena salah satu rekan mereka, yaitu Hardi Sugumol, tidak hadir dalam sidang itu karena sakit keras.

Dengan bantuan seorang perjemah, Antonius Wamang mengatakan, dirinya tidak akan berbicara dalam persidangan jika ada salah satu terdakwa tidak hadir. (JOS/VIN)

50

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

LUMPUR PANAS

Permukaan Tanah Turun, Ratusan Rumah Retak

SIDOARJO, KOMPAS — Ratusan rumah warga yang berada di utara tanggul kolam penampungan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, retak-retak akibat penurunan permukaan tanah. Akibatnya, meski belum terkena lumpur, sebagian besar warga merasa waswas sehingga meninggalkan rumah sejak Juli dan mengontrak rumah di lokasi aman dengan biaya sendiri.

Rumah-rumah yang retak terutama terjadi di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) di Desa Kedungbendo yang berjarak 1 kilometer dari titik semburan dan di Dusun Wangkal, Desa Renokenongo, 800 meter dari titik semburan.

Kawasan yang berada 500 meter dari titik semburan ditetapkan sebagai area ring I, 500-1.000 meter (ring ID), 1.000-1.500 (ring III), dan kawasan lebih dari 1.500

meter dari titik semburan merupakan area ring IV.

Berdasarkan pantauan, Jumat (13/10), dinding rumah penduduk retak 1 milimeter hingga 1 sentimeter. Pola retaknya memanjang dari atas ke bawah dengan panjang bervariasi antara 1 meter-3 meter. Di sejumlah rumah, sudut-sudut dinding bahkan terbelah dan tiang rumah tampak miring. Lantai keramik juga retak atau bahkan terangkat ke atas.

Selain itu, aliran saluran drainase di Perumtas berbalik arah. Akibatnya, air kemudian tergenang di saluran-saluran hingga nyaris meluap. Di beberapa blok, air malahan sudah meluber ke jalan.

Selain keretakan rumah, ratusan sumur penduduk yang berjarak 800 meter hingga 1.500 meter

dari titik semburan juga tercemar air lumpur yang merembes melalui pori-pori tanah sehingga air sumur tidak bisa lagi digunakan (*Kompas*, 13/10).

Permukaan tanah turun

Anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Soffian Hadi, mengatakan, kerusakan bangunan itu terjadi karena penurunan permukaan tanah akibat keluarnya lumpur dari perut bumi sekaligus pembebanan lumpur di permukaan tanah.

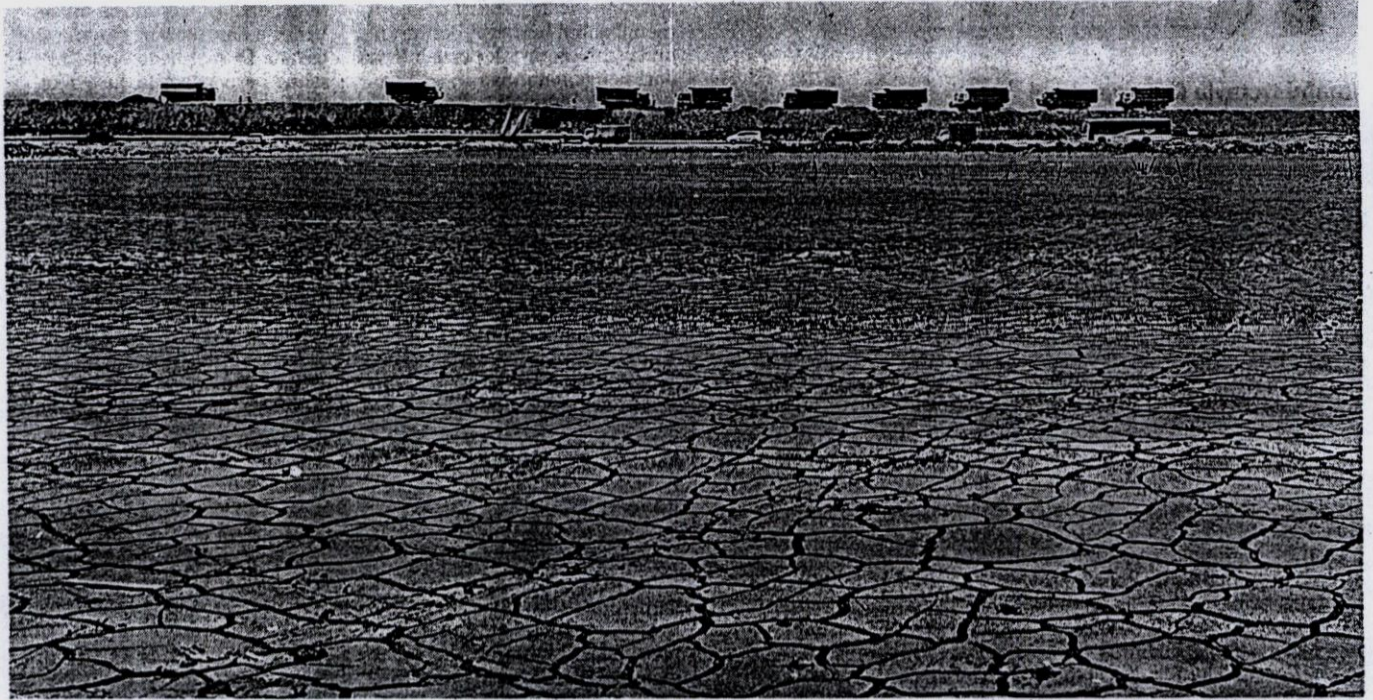
"Rumah-rumah warga pada umumnya hanya didesain untuk pembebanan vertikal. Ketika terjadi pembebanan horizontal, terjadi retakan," papar Soffian.

Penurunan permukaan tanah di titik semburan dan areal sekitarnya rata-rata 2-3 sentimeter per hari, tetapi ada juga yang turun 2 sentimeter per bulan.

Akibat retaknya rumah dan tercemarnya sumur, sebagian besar dari 2.700 rumah di Perumtas sudah ditinggalkan penghuninya. Mereka mengontrak rumah di daerah lain dengan biaya sendiri karena belum mendapat paket uang kontrak dari Lapindo Brantas Inc (LBI) senilai Rp 5 juta untuk dua tahun.

Sebaliknya, sebagian besar dari sekitar 150 keluarga warga Dusun Wangkal masih bertahan meski mereka tidak dapat bekerja. Mereka tak mengungsi karena belum mendapatkan uang kontrak.

Menurut Manager Human Resources Development LBI Sebastian Ja'afar, paket uang kontrak hanya diberikan kepada warga yang terkena langsung dampak lumpur, misalnya warga yang rumahnya kebanjiran lumpur. "Apabila nanti tim nasional me-



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Jalan Tol Gempol-Porong telah dibuka untuk kendaraan umum, Rabu (11/10). Sementara itu, tanggul penahan lumpur yang berada di tepi jalan terus ditinggikan, Jumat kemarin. Meski demikian, kekhawatiran tetap ada karena tanggul dapat jebol sewaktu-waktu.

netapkan Perumtas dan Dusun Wangkal sebagai wilayah tak layak huni, otomatis LBI akan memberikan paket uang kontrak," tutur Sebastian.

Ketika ditemui saat meninjau titik semburan, Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono mengatakan, Perumtas termasuk daerah yang besar kemungkinan akan direlokasi. Alasannya, lokasinya rawan karena bangunan rusak akibat penurunan permukaan tanah.

Namun, saat ini pihaknya masih mengkaji sebelum menetapkan

kan wilayah tersebut sebagai daerah tak layak huni.

Adapun Desa Mindi, Pejarian, Kedungcangkring, dan Jabon sejauh ini masih dinilai aman. Setidaknya belum ada rencana untuk merelokasi penduduk dari desa-desa tersebut.

Ketua DPR Agung Laksono yang juga meninjau titik semburan, kemarin, menyatakan belum ada wacana di DPR untuk mengalokasikan dana APBN untuk membantu biaya penanggulangan lumpur panas. "Sampai saat ini, Lapindo yang menanggung seluruh biayanya," kata

Agung.

Wapres sedih

Di Jakarta, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengaku sedih sekali dan prihatin karena upaya penanggulangan lumpur panas di Sidoarjo belum membuahkan hasil maksimal.

"Tim nasional yang kuat sudah ada di situ. Teknologi macam-macam sudah diterapkan, mulai bor tegak dan bor miring. Hampir semua sudah dilakukan, tetapi memang belum berhasil. Kita sedih sekali," ujar Kalla dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jakarta,

Jumat.

Karena merasa sudah mengesahkan semua upaya, pemerintah tidak dapat berupaya lagi selain berharap pembuangan lumpur ke laut lewat Sungai Porong menggunakan pompa dapat segera dilakukan.

"Pembuangan lumpur ke laut melalui Sungai Porong belum berhasil karena masalah teknis saja. Mudah-mudahan tim nasional, pekerjaan umum, dan pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah ini dalam beberapa hari ke depan," kata Wapres. (LAS/INU)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2006

Ada Masalah jika DK Berhenti

Sektor Kesehatan dan Pendidikan Akan Terganggu

TIMIKA, KOMPAS – Penghentian kucuran dana kemitraan PT Freeport Indonesia, atau biasa disebut dana 1 persen, dinilai belum tentu menyelesaikan berbagai masalah sosial di Kabupaten Mimika, khususnya Kota Timika. Penghentian kucuran dana itu bisa mengganggu pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Saat ini ratusan ribu warga mendapat bantuan pelayanan kesehatan serta 5.000 pelajar dan mahasiswa asal Papua mendapat beasiswa dari dana kemitraan (DK) tersebut. Warga yang menikmati bantuan itu dari tujuh suku di Mimika, termasuk Amungme dan Kamoro.

Hal itu disampaikan Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) John Nakiaya di Timika, Kamis (12/10).

Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas desakan dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) yang meminta dana kemitraan dihentikan ka-

rena dinilai menimbulkan berbagai masalah sosial.

Menurut Ketua Badan Musyawarah (Bamus) LPMAM Andreas Anggaibak salah satu bentuk masalah sosial di Timika adalah maraknya perang suku pascapengucuran dana tersebut tahun 1996. Ini bertentangan dengan pendapat Nakiaya.

Nakiaya mengungkapkan, "Dana kemitraan untuk pelayanan kesehatan mencapai Rp 60 miliar lebih. Dana untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa juga Rp 60 miliar lebih. Kalau dana kemitraan dihentikan, apakah pemerintah daerah siap mengambil alih pembiayaan?"

Menurut data LPMAM, pada 2005 dana kemitraan bidang ke-

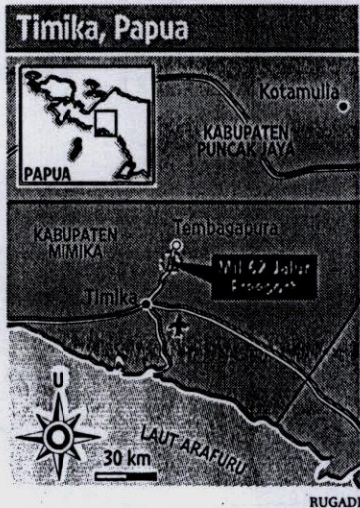
sehatan mencapai Rp 70,61 miliar untuk pengobatan gratis 130.861 warga tujuh suku di Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Waa-Banti. Adapun dana untuk pendidikan Rp 63,32 miliar, termasuk beasiswa 5.435 orang.

"Total dana kemitraan tahun 2005 mencapai Rp 394 miliar. Hingga Juni 2006, PT FI sudah mengucurkan Rp 169 miliar," kata Nakiaya. Total dana kemitraan sejak 1996 hingga Juni 2006 mencapai Rp 1,78 triliun.

Nakiaya mengakui ada dampak sosial terjadi sejak tahun 1996 itu. "Masalah sosial muncul karena ada perbedaan persepsi antara masyarakat penerima dana 1 persen dan PT FI sebagai lembaga donor," kata Nakiaya.

Menurut dia, masalah timbul karena masyarakat merasa dana itu milik masyarakat dan harus dibagikan ke masyarakat.

Nakiaya meminta tokoh suku Amungme dan suku Kamoro mempertimbangkan dengan bijak berbagai kelemahan pengelolaan dana kemitraan PT FI. "Masa depan masyarakat Timika,



masa depan suku Amungme dan Kamoro ada di sini. Jika kita salah mengambil keputusan, akan banyak masalah sosial baru yang muncul dan dampaknya bisa lebih parah," katanya.

Keluarga protes

Sementara itu, proses pengadilan kasus penembakan di per-

tambangan PT FI, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin dipersoalkan kerabat terdakwa. Sekitar 50 kerabat terdakwa kembali berunjuk rasa di PN Timika, meminta ketujuh terdakwa dibebaskan tanpa syarat.

Ketujuh terdakwa itu adalah Antonius Wamang, Agustinus Anggaibak, Yulianus Deikme, Pendeta Ishak Onawame, Esau Onawame, Hardi Sugumol, dan Yairus Kiwak.

Putri Pendeta Ishak, Damaris Onawame, menyatakan, mengapa PN Jakarta Pusat tidak pernah menghadirkan saksi mahkota kasus tersebut, yaitu Patricia Elpishi, salah satu saksi korban sekaligus janda salah satu guru yang tertembak mati. PN Jakarta Pusat malah menghadirkan saksi dari tentara dan FBI.

Dia juga mempertanyakan mengapa lima terdakwa lain, yaitu Agus Kwalik, Dommy Mom, Germanus Onawame, Virtus Wamang, dan Markus Kelabetme dibebaskan. Sementara itu, juga masih ada persoalan tentang barang bukti. (ROW)